

RINGKASAN

JUNITA SARI
220510056

**Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah
Dalam Penanggulangan Banjir Di Kecamatan
Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. (Dr.
Yusrizal, S.H., M.H, & Muksalmina, S.H.I.,
M.H.)**

Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan banjir belum berjalan optimal, yang ditunjukkan dengan masih sering terjadinya banjir di kawasan Jalan Lintang Desa Kemili meskipun telah dilakukan perbaikan drainase dan pemasangan gorong-gorong. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam penanggulangan banjir di kawasan Jalan Lintang Kecamatan Bebesen; dan (2) bagaimana kendala yang dihadapi serta upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir di kawasan tersebut.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir, yakni sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar diterapkan dan memberikan dampak dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan banjir dilakukan melalui normalisasi drainase, pembersihan sedimen, dan pemasangan *box culvert*. Kebijakan ini mampu mengurangi durasi genangan air dari sekitar 1–2 jam menjadi sekitar 10 menit setelah hujan. Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, saluran air yang tersumbat sampah, serta belum optimalnya sistem drainase. Upaya pemerintah dilakukan melalui perbaikan dan pemeliharaan drainase serta gotong royong bersama masyarakat.

Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah agar lebih memprioritaskan pembangunan sistem drainase terpadu mulai dari kawasan Jalan Aman Kuba hingga Simpang 1001 Jalan Lintang Kampung Kemili, sehingga aliran air dapat terhubung secara menyeluruh dan mampu mengurangi potensi genangan saat curah hujan tinggi. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait serta memperkuat partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan kegiatan pemeliharaan drainase secara berkelanjutan.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah Daerah, Penanggulangan Banjir, Drainase, Masyarakat.

SUMMARY

**JUNITA SARI THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL
220510056 GOVERNMENT POLICIES IN FLOOD DISASTER
MANAGEMENT IN BEBESEN DISTRICT ACEH
TENGAH.**

(Dr. YUSRIZAL, S.H., M.H & MUKSALMINA, S.H.I., M.H)

The implementation of the local government's policy on flood management in Bebesen District, Central Aceh Regency, is regulated by Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. However, its implementation has not been optimal, as flooding continues to occur frequently in the Jalan Lintang area of Kemili Village despite drainage improvements and the installation of culverts. Based on these conditions, this study addresses two research questions: (1) How is the implementation of the Central Aceh Regency Government's policy on flood management in the Jalan Lintang area of Bebesen District? and (2) What are the obstacles encountered and the efforts undertaken by the local government in managing floods in the area?

This study employed a qualitative research method using an empirical juridical approach. The scope of the research focused on the effectiveness of the local government's flood management policy, particularly the extent to which the policy has been implemented and its impact on the community.

The findings indicate that the implementation of the policy has been carried out through drainage normalization, sediment removal, and the installation of concrete box culverts. These measures have reduced the duration of floodwater stagnation from approximately 1–2 hours to around 10 minutes after rainfall. The main obstacles include low public awareness, drainage channels clogged with waste, and an inadequate drainage system. The government's efforts include improving and maintaining drainage systems as well as conducting community-based mutual cooperation.

It is recommended that the Central Aceh Regency Government prioritize the development of an integrated drainage system from the Jalan Aman Kuba area to Simpang 1001 on Jalan Lintang, Kemili Village, to ensure proper water flow and reduce flooding during periods of heavy rainfall. In addition, the local government should strengthen inter-agency coordination and enhance community participation through public awareness programs and sustainable drainage maintenance activities.

Keywords: *Regional Government Policy, Flood Management, Drainage, Community.*